

**LAPORAN MAGANG**  
**PADA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



DI SUSUN OLEH :  
LEDY APRILEANA  
2020B1D038

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (IP)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIPOL)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM (UMMAT)**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG**  
**BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DI SUSUN OLEH :**

**LEDYAPRILEANA**

**NIM: 2020B1D038**

Disetujui

**KABID PENGAWASAN, HUMAS  
DAN HUBAL BAWASLU NTB**



**Ida Ayu Wiyah Manik, S.STP., MH**

**NIP. 19710820 199803 1 009**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Hidayatullah, S.IP., M.IP**

**NIDN. 0809038902**

Mengetahui,  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

**Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**

**NIDN. 0827118801**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang yang dilaksanakan di kantor BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang merupakan suatu program Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram dan menjadi salah satu persyaratan mutlak untuk mencapai kelulusan sarjana S1.

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk menambah pemahaman, wawasan, dan pengalaman. Serta untuk mengaplikasikan teori yang diajarkan di kampus ke dunia kerja yang nyata. Dengan begitu penulis dapat memahami bagaimana lingkungan kerja, aturan dan tata kerama dalam pekerjaan tersebut. Selama 2 bulan, kegiatan magang penulis berkesempatan untuk melakukan pengamatan dan pekerjaan.

Dalam pembuatan tugas laporan ini penulis mendapatkan pengalaman yang berguna bagi mahasiswa terutama bagi saya karena dapat mengetahui sistem kerja dari kantor BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan program magang ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk membina pengetahuan antara disiplin ilmu yang dimiliki dengan aplikasi di lapangan kerja yang sesungguhnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini sepenuhnya ada keterbatasan pemahaman, pengetahuan, wawasan yang penulis miliki, sehingga pada laporan magang ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini agar tidak terulang lagi dalam pembuatan tugas berikutnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan, bentuk dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan laporan ini.

Dalam menyelesaikan praktek magang ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP (prodi Studi Ilmu Pemerintahan)

2. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP (Dosen Pembimbing Magang)
  3. Panitia Magang Studi Ilmu Pemerintahan
  4. BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat
- ⊕ Ida Ayu Wayan Manik, S.STP., MH. (KABAG PENGAWASAN, HUMAS DAN HUBAL BAWASLU NTB)

→ Dan Pegawai (staff) bidang Pengawasan, Humas serta Hubal dan BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Semua pihak yang belum sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah dengan ikhlas turut membantu dalam Penyusunan Laporan ini. Semoga dengan semua jasa dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Akhirnya penulis berharap semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Mataram, 30 Maret 2023

Penulis

Ledy Aprileana

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Lokasi dan Waktu .....	3
1.3.1 Lokasi Kegiatan Magang .....	3
1.3.2 Waktu Kegiatan Magang .....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Magang .....	4
1.4.1 Tujuan Magang .....	4
1.4.2 Manfaat Magang .....	4
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI ATAU LEMBAGA.....	6
2.1. Profil Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	6
2.1.1 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban BAWASLU NTB .....	6
2.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi NTB .....	10
2.1.3 Struktur Organisasi BAWASLU NTB .....	11
2.1.4 Pembagian Tugas Anggota Bawaslu Provinsi .....	11
2.1.5 Tugas Bawaslu provinsi .....	12
2.1.6 Wewenang Bawaslu Provinsi .....	14

2.1.7	Kewajiban Bawaslu Provinsi .....	15
2.1.8	Tugas Sekretariat Bawaslu NTB.....	16
BAB III PELAKSANAAN MAGANG .....		17
3.1	Kegiatan mahasiswa .....	17
3.2.	Uraian Tugas Dan Kegiatan .....	18
3.3.	Hal-Hal Yang Diperoleh .....	19
3.4	Kendala .....	19
3.4.1	Lingkungan Kerja .....	20
3.4.2	Sistem Kerja .....	20
3.5	Cara Mengatasi Kendala / Hambatan .....	21
BAB IV PENUTUP .....		22
4.1	Kesimpulan .....	22
4.2	Saran .....	23
4.2.1	Saran untuk Lembaga .....	23
4.2.2	Saran Sub Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal .....	23
4.2.3	Saran untuk BAWASLU terhadap Mahasiswa Magang .....	24
DAFTAR PUSTAKA.....		25
LAMPIRAN.....		26
1.	Lampiran Presensi Kehadiran Peserta magang .....	26
2.	Lampiran Agenda Harian Peserta magang .....	28
3.	Lampiran Dokumentasi kegiatan magang .....	34

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang aspek keahlian Profesional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan lengkap, tetapi saran dan prasarana tersebut hanya menunjang aspek keahlian profesional secara teori saja. Dalam dunia kerja nantinya dibutuhkan pengetahuan akan teori yang telah di dapatkan dari bangku perkuliahan dan pelatihan praktik di lapangan guna memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya. Magang kerja merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja. Magang kerja ini merupakan suatu kegiatan praktik bagi mahasiswa dengan tujuan mendapatkan pengalaman dari kegiatan tersebut, yang nantinya dapat di gunakan untuk pengembangan profesi.

Bagi para Mahasiswa/i yang akan memasuki dunia kerja, sebaiknya melakukan fase transisi melakukan praktik kerja magang pada suatu instansi pemerintahan, dengan tujuan agar Mahasiswa/i yang melakukan kerja magang tersebut dapat menyerap ilmu dan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana tugas dan kinerja pemerintah dalam suatu birokrasi.

Pelaksanaan magang jika di lihat dari aspek Mahasiswa/i sangat penting dalam proses pematangan bagi Mahasiswa/i sebelum benar-benar Mahasiswa/i memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Dengan adanya kerja magang diharapkan Mahasiswa/i akan mendapatkan pengalaman disiplin ilmu praktek kerja nyata serta kerja sama tim dalam mempertanggung jawabkan suatu pekerjaan.

Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Barat yang bergerak di bidang administrasi, dengan visi dan misi yang di emban oleh perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram yang nantinya akan menjadi perguruan tinggi unggulan yang bertaraf Internasional dalam bidang administrasi dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, kreatif dan inovatif dalam iptek dan imtaq serta berjiwa kewirausahaan terhadap perkembangan dunia informasi, berwawasan global, serta mampu

mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Hal ini lah yang mendasari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram untuk mengadakan Magangan/PKL. Pada Semester VI (enam) jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram memberikan rekomendasi lokasi magang kepada mahasiswa yang menjadi mitra kerja sama kampus dalam hal penempatan magang serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan sendiri tempat praktik kerja lapangan (PKL) jika instansi yang telah di tentukan oleh Kampus tidak menerima surat perizinan mangang yang telah di ajukan oleh Mahasiswa/i.

Melalui magang ini diharapkan Mahasiswa/i mengakomodasikan antara konsep-konsep teori dan praktek yang akan bermuara kepada prestasi belajar sekaligus memberi bekal kepada Mahasiswa/i sebelum memasuki duania kerja yang sesungguhnya.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan suatu batasan terhadap bagian atau bidang penulis melakukan magang. Tujuannya adalah untuk memfokuskan dan menjelaskan bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan magang. Penulis melaksanakan magang di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tempat magang penulis di BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT yang berlokasi di Jl. Semanggi No 37, Monjoko Bar., Kec Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125.

Pelaksanaan magang berlangsung selama 2 bulan. Dimulai dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 30 Maret 2023. Dalam melaksanakan di BAWASLU PROV NTB, Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tetap berorientasi pada iklim kerja dan memahami disiplin kerja di BAWASLU PROV NTB. Sehingga kecakapan kerja yang di dapatkan seperti struktur organisasi, bidang-bidang kerja, hubungan sosial, dan batasan-batasan.

Program Magang/PKL dilakukan di BAWASLU PROV NTB, Diikuti oleh 3 Mahasiswa Program Study Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam pelaksanaan magang, penulis di tempatkan di kantor pemerintah dibidang Pengawasan, Humas dan Hubal.

Berikut adalah beberapa gambaran ruang lingkup dari pelaksanaan program Magang/PKL di Bawaslu Prov Nusa Tenggara Barat.

### 1.3 Lokasi Dan Waktu

#### 1.3.1 Lokasi Kegiatan Magang

Lokasi magang akan di rekomendasikan oleh pihak kampus bisa juga memilih sendiri lokasi tempat magang untuk mempermudah perizinan. Pada magang kali ini kelompok magang terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok, pada kegiatan magang tahun ini lokasi magang di Bawaslu Prov NTB, berlokasi di Jl. Semanggi No 37, Monjok Bar., Kec Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125, yang dilaksanakan kegiatan magang selama 60 Hari, dari 31 Januari 2023 sampai tanggal 31 Maret 2023.

#### 1.3.2 Waktu Kegiatan Magang

Jam masuk	Jam Istrahat	Jam Keluar
Senin-kamis 08.00 WITA	12.00- 13.00 WITA	16.00 WITA
Jum'at 08.00 WITA	11.00- 14.0 WITA	16.30WITA

### 1.4 Tujuan Dan Manfaat Magang

Magang merupakan salah satu program untuk memperkenalkan Mahasiswa/i dengan dunia Kerja.

#### 1.4.1 Tujuan Magang

Adapun tujuan yang diperoleh dari kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

- a. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan strata 1 (S1) untuk persiapan menjadi sarjana.
- b. Memperkenalkan Mahasiswa/i kepada situasi dan kondisi kerja yang sebenarnya sehingga dapat membiasakan diri dengan lingkungan kerja yang nyata.
- c. Meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa sebagai calon

tenaga kerja yang diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan.

- d. Menambah wawasan pikiran dan menumbuhkan sikap profesional dengan mempeajari penanganan masalah dalam melaksanakan pekerjaan.

#### 1.4.2 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut :

- a. Mampu menjadi lulusan yang mampu memberikan suasana dan iklim yang segar berkat pengalaman magang saat memasuki dunia kerja sehingga dalam dunia kerja dapat tetap berprestasi dan berkontribusi positif dalam lingkungan kerja.
- b. Saat menjadi lulusan perguruan tinggi atau sarjana, Mahasiswa dapat memberikan harapan dan ide baru.
- c. Menjawab setiap kebutuhan dari instansi baik swasta maupun milik negara dalam hal tenaga kerja yang produktif dan mumpuni serta memiliki keterampilan tingkat tinggi dalam segala hal, dengan kegiatan magang ini semua itu bisa di persiapkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa peserta magang saat mengikuti proses kegiatan magang dengan tetap belajar saat mengikuti proses magang.
- d. Mampu menjadi tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing tinggi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI ATAU LEMBAGA**

#### 2.1 Profil Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

##### 2.1.1 Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban BAWASLU PROV NTB

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

###### 2.1.1.1 Tugas Pokok

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pengawas pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap.
  1. Pelanggaran Pemilu
  2. Sengketa Proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas :
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
  2. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
  3. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, dan
  4. Perencanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta data pemilih tetap
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
  3. Penetapan Peserta Pemilu
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
  5. Pelaksanaan dan dana Kampanye
  6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS

8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
  10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjut, dan pemilu susulan, dan
  11. Penetapan hasil pemilu
- e. Mencegah terjadinya apraktik politik uang
  - f. Mengatasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
  - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas :
    1. Putusan DKPP
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
  - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP
  - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
  - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Mengevaluasi pengawasan pemilu
  - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

#### 2.1.1.2 Wewenang BAWASLU PROVINSI NTB

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi/mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil akhil sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu LN
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang

#### 2.1.1.3 Kewajiban

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara priodik atau berdasarkan kebutuhan
- d. mengawasi pemuktahiran dan pemiliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

#### 2.1.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi NTB

Visi dan Misi Bawaslu diatur dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum no 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Adapun visi dan misi bawaslu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan trintegrasi.
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat diseluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

### 2.1.3 Struktur Organisasi BAWASLU NTB



Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

### 2.1.4 Pembagian Tugas Anggota Bawaslu Provinsi

1. Ketua Bawaslu NTB - Divisi Pengawasan  
Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH.
2. Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Penindakan Pelanggaran  
Itratip, ST., MT.
3. Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Hukum, Humas dan Hubal  
Umar Achmad Seth, SH., MH.
4. Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Hukum, Humas dan Hubal  
Suhardi, S.IP., MH.
5. Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi NTB—Divisi Penyelesaian Sengketa  
Dr.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP
6. Kepala Sekretariat Bawaslu NTB

Lalu Ahmad Yani S. KM., M.Kes

7. Kepala Bagian Administrasi Lalu Rizizvan Arista, AP

8. Kepala Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal

Ida Ayu Wayan Manik, S.STP.,MH

9. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Ahmad Darmawan, S.STP., MH

#### 2.1.5 Tugas Bawaslu provinsi

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu dan
  2. Sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
  3. Penetapan Peserta Pemilu
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
  11. Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang
  - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
  - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP.
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
    6. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP
  - h. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
  - i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
  - j. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
  - k. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

#### 2.1.6 Kewajiban Bawaslu Provinsi

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang.

#### 2.1.7 Tugas Sekretariat Bawaslu NTB

Tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi (kelas B):

- a. Kepala Sekretariat
  - 1. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi.
  - 2. Melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional.
  - 3. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
- b. Bagian Administrasi
  - 1. Melaksanakan urusan administrasi
  - 2. Koordinasi pelaksanaan pengawasan internal
- c. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
  - 1. Melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran
  - 2. Melaksanakan urusan pengawasan partisipatif
  - 3. Pengelolaan hubungan antar lembaga
  - 4. Melaksanakan urusan akreditasi dan penguatan pemantau pemilu.
  - 5. Pengawasan tahapan Pemilu di provinsi
  - 6. Pengelolaan data informasi
- d. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
  - 1. Melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu
  - 2. Teknis persidangan pelanggaran Pemilu
  - 3. Penyelesaian sengketa proses Pemilu
  - 4. Urusan hukum di provinsi

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN MAGANG**

#### **3.1 Kegiatan Mahasiswa**

Dalam kegiatan pelaksanaan magang di kantor BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jl. Semanggi No.37, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83125. Mahasiswamagang melaksanakan sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan 14 April 2022. Setiap Mahasiswa mendapat penempatan sub divisi masing-masing. Penempatan tergantung skill dari masing-masing mahasiswa. Pada BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 3 Sub divisi, yaitu Divisi Administrasi, Divisi Pengawasan, Humas & Hubal, Serta Disivi Penyelesaian sengketa dan Hukum. Pada kesempatan kali ini penulis ditempatkan pada Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal.

Sebelum melaksanakan Magang, mahasiswa peserta magang mendapat arahan dan diskusi seputar lingkup kantor BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh pihak yang berwenang, kali ini yaitu staff SDM mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab peserta-pesertamagang dan peraturan-peraturan yang harus ditaati. Pelaksanaan magang yang dilaksanakan di lingkup Kantor BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan magang dilaksanakan selama dua bulan, yang terhitung mulai dari tanggal 14 Februari 2022 s/d 14 April 2022. Kegiatan magang dilaksanakan sehari-harinya mengikuti aturan masuk kantor yang sudah ditetapkan waktunya.

Adapun peraturan mendasar dari BAWASLU Provinsi NTB sebelum masuk ke kegiatan pokok mahasiswa magang. Penulis akan menjelaskan tentang waktu kerja dan kegiatan rutin yang harus di ikuti seluruh pegawai pada BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara barat dan juga termasuk mahasiswayang sedangmagang, diantaranya :

1. Mengikuti apel setiap hari senin dan kamis pukul 07 : 30 WITA - Selesai di halaman kantor BAWASLU Provinsi Nusa Tenggara yang di ikuti oleh semua pegawai dan kepala BAWASLU Provinsi NTB.
2. Selain mengikuti peraturan kantor mahasiswa juga di haruskan untuk membantu setiap pekerjaan pekerjaan yang ada dikantor terutama pekerjaan pada bidang masing-masing. Berikut laporan penulis saat di tempatkan di Bidang Pengawasan, Humas dan Hubal.

### 3.2 Uraian Tugas dan Kegiatan

Dalam melaksanakan program magang penulis banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman serta wawasan yang sangat berharga. Berikut berupa gambaran kegiatan peserta Magang/PKL di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat :

1. Mendokumentasi setiap kegiatan
2. Menjadi operator di setiap kegiatan rapat dan sosialisasi yang diselenggarakan secara daring
3. Membantu menginput data dari setiap kegiatan rapat maupun sosialisasi bidang Pengawasan, Humas dan Hubal di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Ikut turun langsung ke lapangan mengikuti partorili kawal hak pilih yang di gelar oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Mengikuti rapat-rapat yang mengundang divisi Pengawasan, Humas dan Hubal dengan rapat yang di adakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Membantu meliput setiap kegiatan yang melibatkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Mengikuti Kunjungan ke setiap Panwascam
8. Mengerjakan tugas yang di berikan oleh Staf di Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal contohnya membuat Notulensi hasil rapat yang di selenggarakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

### 3.3 Hal-Hal Yang Diperoleh

Adapun hal-hal yang di peroleh dalam proses magang yang di laksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

1. Bisa mempelajari dengan jelas mengenai wewenang dan tugas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam, penyelenggaraan pemilu dari tahap persiapan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa pemilu
2. Mengetahui sistem Pengawasan, Humas dan Hubal, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu penyelenggara pemilu dari tahapan sebelum pemilu hingga pasca pemilu

3. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang dunia kerja sehingga akan mempunyai pengalaman tentang bagaimana dunia kerja dan pada akhirnya mereka juga akan mempunyai tolak ukur ketika selesai kuliah nbQ
4. Bisa mengetahui lebih dekat dan lebih banyak tentang Instansi Bawaslu Provinsi NTB, karena sebelumnya penulis hanya mengetahui nama saja tanpa mengetahui bagaimana kinerja dan cara kerja Bawaslu Provinsi NTB. Dalam kegiatan magang penulis bisa mendapatkan info lebih banyak dari yang penulis bayangkan sebelumnya seperti hal meendasar tentang Bawaslu Provinsi NTB.

### 3.4 Kendala

Selama keegiatan magang berlangsung penulis banyak melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sebenarnya sudah biasa di lakukan, tetapi karena di dalam instansi pemerintahan ada prosedural yang wajib diikuti, maka hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani kegiatan magang. Tantangan selanjutnya bagi penulis perbagi adalah bagaimana mempelajari tantangan tersebut.

Dalam pelaksanaan program magang hambatan atau kendala merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena semua itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun yang menjadi hambatan atau kendala selama magang disini yaitu masalah penyesuaian diri, yaitu :

#### 3.4.1 Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja menjadi hambatan dalam proses magang dengan lingkungan kerja yang baru dan berbeda dari semua sisi yang pernah dirasakan saat masi belajar dibangku perkuliahan dengan dosen dan teman-teman. Kami memerlukan waktu yang cukup untuk beradap tasi agar bisa berperilaku dan bertindak sesuai dengan budaya dan peraturan di badan kesatuan bangsa dan politik kota mataram dengan landasan tetap menjaga dan menjunjung nilai-nilai almamater. Lingkungan kerja mencakup budaya instansi, peraturan dan ruang kerja serta tuntutan kerja. Faktor peraturan merupakan faktor yang membuat merasa canggung dalam bersikap dan bertindak dengan hati-hati, dikarenakan belum terbiasa dengan iklim kerja yang sesungguhnya sebelum magang, menjadikan perubahan yang sangat derastis pada peserta magang dan lingkungan memaksa peserta magang harus bisa menyesuaikan diri dengan kinerja Bawaslu Provinsi NTB.

### 3.4.2 Sistem Kerja

Sistem kerja disini yaitu sangat mengikuti perkembangan jaman dunia kerja, sehingga apa yang menjadi kegiatannya tetap update terhadap perkembangan dan tetap memberikan perubahan dalam sistem perusahaan sehingga semua kegiatannya menggunakan by sistem (sistem kerja online), dengan demikian sebagai peserta magang yang baru merasakan dunia kerja merasa sangat tertantang untuk bisa menyesuaikan diri meskipun penyesuiannya membutuhkan waktu yang tidak cepat. Hal yang menarik ketika lingkungan Bawaslu Provinsi NTB mengajarkan untuk bekerja dengan disiplin teamwork dan berintegritas.

### 3.5 Cara Mengatasi Kendala Atau Hambatan

Cara mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan magang adalah :

1. Tetap belajar setiap hari dan meminta panduan dari staf Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi NTB untuk mau membimbing peserta magang supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada di kantor dan semua staf pun menerima dan membimbing para peserta magang dengan sangat baik, sehingga hari demi hari dapat mulai terbiasa dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada.
2. Karena sistem Bawaslu Provinsi NTB menggunakan by sistem maka peserta magang mempunyai kesempatan untuk belajar di luar dan di dalam kantor untuk bisa memahami sistem tersebut. Selain itu kami diajarkan sedikit demi sedikit dalam sistem kerja di kantor dan kami pun sedikit memahami meskipun belum sepenuhnya paham.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik merupakan bagian dari kegiatan akademik yang wajib dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang memiliki tujuan utama untuk membandingkan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktik yang ada di lembaga setempat berlangsung sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki sebagai sarana penghubung antara lembaga perguruan tinggi dengan lembaga instansi dalam rangka meningkatkan SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Mahasiswa adalah terlebih dahulu melaksanakan pembekalan yang diselenggarakan oleh lembaga akademik yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dengan para dosen pendamping lapangan yang bertujuan untuk menambah kesiapan dan melaksanakan kegiatan magang. Kegiatan magang ini berlangsung selama 5 hari senin sampai jum'at, setiap minggu dalam melaksanakan kegiatan praktik, Mahasiswa harus datang paling tidak pukul 08.00 dan pulang sesuai dengan jam kantor. Bekerja sesuai standar operasional kantor dan juga mengimplementasikan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi NTB sesuai UU Kepemiluan yang berlaku. Adapun beberapa hal yang disimpulkan dari kegiatan magang di Bawaslu Provinsi NTB, pada khususnya bidang Pengawasan, Humas, dan Hubal sebagai berikut :

1. Merumuskan bahan kebijakan teknis, menetapkan rencana strategis kerja tahunan Bawaslu Provinsi NTB sesuai UU Kepemiluan.
2. Merumuskan bahan kajian analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan standar jabatan, kompetensi jabatan melalui hasil analisis jabatan sesuai formasi kebutuhan.
3. Menerapkan peraturan Perundang-Undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas baik dari pusat maupun provinsi.
4. Merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan bidang tugas Bawaslu Provinsi NTB.

5. Mengevaluasi hasil capaian berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja baik laporan bulanan, triwulan semester dan tahunan Bawaslu Provinsi NTB

## 4.2 Saran

### 4.2.1 Saran Untuk Lembaga

1. Lembaga Bawaslu Provinsi NTB, kedepannya tetap menjaga garis koordinasi antar setiap bidang dan staf supaya kinerja tidak salah arah, tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik agar lebih baik lagi, tetap disiplin, kompak, dan berintegritas.
2. Perbaiki fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan agar memberikan kenyamanan terhadap masyarakat.
3. Perbaiki media informasi untuk lebih up to date kedepannya.

### 4.2.2 Saran Sub Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal

1. Tetap menjaga dan meningkatkan kedisiplinan dan tata tertib di ruang kerja supaya dapat meningkatkan hasil kerja yang lebih maksimal.
2. Lebih memperhatikan sarana dan prasarana kantor untuk kenyamanan dan kepentingan pelayanan.
3. Semoga hubungan antar pegawai tetap terjaga dan saling berkerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

### 4.2.3 Saran Untuk Bawaslu Terhadap Mahasiswa Magang

1. Sesuai MoU yang telah disepakati bersama Universitas sekota Mataram agar lebih aktif melibatkan mahasiswa magang dalam setiap kegiatan Bawaslu Provinsi NTB.
2. Memberi ruang gerak lebih untuk mahasiswa dapat mengeksplorasi kemampuannya.
3. Memberikan tugas sesuai tupoksi dan kemampuan para peserta magang, serta tidak melenceng dari tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi NTB.

Demikianlah saran-saran yang dapat disampaikan setelah melaksanakan magang di Bawaslu Provinsi NTB. Semoga bisa bermanfaat bagi kemajuan instansi, dan bagi Mahasiswa Program Study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram bisa menjadi bekal saat lulus dan memasuki dunia kerja.

## Daftar Pustaka

Bawaslu. 2020. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta.

Bawaslu,NTB. 2022. *Sejarah Badan Pengawasan Pemilu Provinsi NTB*. <https://ntb.bawaslu.go.id>. Diakses pada tanggal 17 April 2022.

Google Maps. 2022. Alamat bawaslu NTB. <https://goo.gl/maps/C8xjHfu8HwwmBcmt8>. Diakses pada tanggal 17 April 2022.

Lampiran

1. Lampiran Persnsi Kehadiran Peserta Magang

Lampiran:

Persensi Kehadiran Peserta Magang

Nama : LEDY APRILEANA

Nim : 2020B1D038

Bulan ke : 1

Lokasi magang : BAWASLU PROV NTB

No	Hari/Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	Rabu, 1 Feb 2023	08.00		17.00		
2	Kamis, 2 Feb 2023	08.00		16.30		
3	Jum'at, 3 Feb 2023	08.00		16.30		
4	Sabtu, 4 Feb 2023	-		-		Libur
5	Minggu, 5 Feb 2023	-		-		Libur
6	Senin, 6 Feb 2023	08.00		16.30		
7	Selasa, 7 Feb 2023	08.00		16.30		
8	Rabu, 8 Feb 2023	08.00		16.30		
9	Kamis, 9 Feb 2023	08.00		16.30		
10	Jum'at, 10 Feb 2023	08.00		18.00		
11	Sabtu, 11 Feb 2023	-		-		Libur
12	Minggu, 12 Feb 2023	-		-		Libur
13	Senin, 13 Feb 2023	08.00		16.30		
14	Selasa, 14 Feb 2023	08.00		16.30		

15	Rabu, 15 Feb 2023	-	2	-	2	12 in
16	Kamis, 16 Feb 2023	08.00	2	16.30	2	
17	Jum'at, 17 Feb 2023	08.00	2		2	
18	Sabtu, 18 Feb 2023	-	2	-	2	Libur
19	Minggu, 19 Feb 2023	-	2	-	2	Libur
20	Senin, 20 Feb 2023	08.00	2	16.00	2	
21	Selasa, 21 Feb 2023	08.00	2	16.00	2	
22	Rabu, 22 Feb 2023	08.00	2	16.00	2	
23	Kamis, 23 Feb 2023	08.00	2	16.30	2	
24	Jum'at, 24 Feb 2023	08.00	2	16.30	2	
25	Sabut, 25 Feb 2023	-	.	-		Libur
26	Minggu, 26 Feb 2023	-		-		Libur
27	Senin, 27 Feb 2023	08.00	2	16.30	2	
28	Selasa, 28 Feb 2023	08.00	2	16.00	2	

Lampiran:

Persensi Kehadiran Peserta Magang

Nama : LEDY APRILEANA

Nim : 2020B1D038

Bulan ke : 2

Lokasi magang : BAWASLU PROV NTB

No	Hari/Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	Rabu, 1 Mar 2023	08.00		16.00		<del>Libur</del>
2	Kamis, 2 Mar 2023	08.00		16.00		
3	Jum'at, 3 Mar 2023	08.00		16.30		
4	Sabtu, 4 Mar 2023	-		-		Libur
5	Minggu, 5 Mar 2023	-		-		Libur
6	Senin, 6 Mar 2023	08.00		16.00		
7	Selasa, 7 Mar 2023	08.00		16.00		
8	Rabu, 8 Mar 2023	08.00		16.00		
9	Kamis, 9 Mar 2023	08.00		16.00		
10	Jum'at, 10 Mar 2023	08.00		16.30		
11	Sabtu, 11 Mar 2023	-		-		Libur
12	Minggu, 12 Mar 2023	-		-		Libur
13	Senin, 13 Mar 2023	08.00		16.00		
14	Selasa, 14 Mar 2023	08.00		16.00		
15	Rabu, 15 Mar 2023	08.00		16.00		

16	Kamis, 16 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
17	Jum'at, 17 Mar 2023	08.00	2	16.30	2	
18	Sabtu, 18 Mar 2023	-		-		Libur
19	Minggu, 19 Mar 2023	-		-		Libur
20	Senin, 20 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
21	Selasa, 21 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
22	Rabu, 22 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
23	Kamis, 23 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
24	Jum'at, 24 Mar 2023	08.00	2	16.30	2	
25	Sabtu, 25 Mar 2023	-		-		Libur
26	Minggu, 26 Mar 2023	-		-		Libur
27	Senin, 27 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
28	Selasa, 28 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
29	Rabu, 29 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
30	Kamis, 30 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	
31	Jum'at, 31 Mar 2023	08.00	2	16.00	2	

Mataram, 30 Januari 2023

Pendamping pada Instansi



Ika Ayu Wayan Mami, S.STP.,MH

NIK 19710820199031009

2. Lampiran Agenda Harian Peserta Magang

Lampiran :

**Agenda Kegiatan Peserta Magang**

**Nama : LEDY APRILEANA**

**Nim : 2020B1D038**

**Bulan Ke : 1 (Satu)**

**Lokasi Magang : BAWASLU NTB**

No	Hari/Tanggal	Agenda Harian		
		Jenis Kegiatan	Paraf Pembimbing Magang	Keterangan
1	Selasa, 31 Jan 2023	Pelepasan Magang dan penerimaan di Kantor Bawaslu Provins NTB		
2	Rabu, 1 Feb 2023	Liputan dihotel Fave Mataram dengan judul sosialisasi pelaksanaan pengawasan peraturan KPU No 10 Tahun 2022 tentang pencalonan calon peseorangan DPD beserta potensi permasalahan		
3	Kamis, 2 Feb 2023	-Diberi tugas mencari wewenang, tugas, fungsi, struktur organisasi tentang Bawaslu Provinsi NTB -ikut meliput podcast dengan tema "Alumni SKPP menjadi penyelenggara pemilu" pewawancara pak Edralin H dan Narasumber Linda dari Panwascam Selaprangan -Podcast ke2, Pewawancara Vera da Narasumber Aji dari Panwascam Mataram dengan tema "Alumni SKPP menjadi penelenggara pemilu"		
4	Jum'at, 3 Feb 2023	-Liputan di hotel Prime Park dengan judul sosialisasi peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia No 181/PMK.05/2022 Tentang cara pelaksanaan penganggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum -Liputan di hotel Lombok Raya Judul Rapat Pleno Rekapitulasi hasil verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dukungan minimal pemilih dan sebaran bekal calon		

		anggota DPD dalam pemilihan umum tahun 2024.	2	
5	Sabtu, 4 Feb 2023			Libur
6	Minggu, 5 Feb 2023			Libur
7	Senin, 6 Feb 2023	Di beri tugas membuat opini tentang keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan pemilu	2	
8	Selasa, 7 Feb 2023	Media visit Bawaslu NTB ke Kantor Lombok Post dan ke Lombok TV untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Bawaslu NTB dengan kantor media masa di NTB dalam penyebaran informasi, menjaga netralitas ASN, dan menekan penyebaran hoaks jelang pemilu 2023, dan kunjungan ke kantor Lombok TV juga membahas mengenai penyebaran informasi kepemiluan di media elektronik, serta untuk menjaga iklim siaran TV yang bersih	2	
9	Rabu, 8 Feb 2023	Di beri tugas Dasar" Hukum Pilkada dan Pemilu dan format Notulensi	2	
10	Kamis, 9 Feb 2023	Membuat Konten Pantu Pemilu	2	
11	Jum'at, 10 Feb 2023	Membuat notulensi saat Rapat Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi NTB dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2024	2	
12	Sabtu, 11 Feb 2023			Libur
13	Minggu, 12 Feb 2023			Libur
14	Senin, 13 Feb 2023	-Membuat Notulensi hasil Rapat di hari jum'at. -Menjadi Audiensi dengan Lembaga Pemantau Pemilu Labaki	2	
15	Selasa, 14 Feb 2023	Mengikuti kegiatan launching komuditas digital pengawasan partisipatif jarimu awasi pemilu dan deklarasi pemilu dan Berintegritas	2	
16	Rabu, 15 Feb 2023			Izin

17	Kamis, 16 Feb 2023	Membantu persiapan Podcast Bersama Civitas Akademika. Dr. Agus, Dosen UIN Mataram Teman “Membahas Seputar Kerawanan IKP, Keterlibatan Pemilih Pemilu”		
18	Jum'at, 17 Feb 2023	-Membuat rekapitulasi pengawasan mekelar pencaklitan Prov dan sinergi Bawaslu dengan kampus dan sosialisasi pengawasan patisipatif filingkungan Akademika.		
19	Sabtu, 18 Feb 2023			Libur
20	Minggu, 19 Feb 2023			Libur
21	Senin, 20 Feb 2023	Melakukan kunjungan ke Panascam Labuapi		
22	Selasa, 21 Feb 2023	Melakukan kunjungan ke Panwascam Praya Barat Daya		
23	Rabu, 22 Feb 2023	Melakukan kunjungan ku Panwascam Kediri		
24	Kamis, 23 Feb 2023	Melakukan sosialisasi penguatan pengawasan hak pilih bagi kelompok disabilitas pada pemilu 2024		
25	Jum'at, 24 Feb 2023	Terima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Bawaslu Provinsi NTB bahas Bersama Penanganan Politik Uang dalam Pemilu		
26	Sabtu, 25 Feb 2023			Libur
27	Minggu, 26 Feb 2023			Libur
28	Senin, 27 Feb 2023	Meliput dan Mengikuti kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih		
29	Selasa, 28 Feb 2023	Meliput Kegiatan Worshop Tata Cara Pengimputan Data Pada Penanganan Pelanggaran di Ruang Rapat Bawaslu NTB		

Mataram, 30 Januari 2023

Dosen Pembimbing Magang

Hidayatullah, S.IP., M.IP

NIDN. 0809038902

**Lampiran:****Agenda Harian Peserta Magang**

Nama : Ledy Aprileana  
Nim : 2020B1D038  
Bulan ke : 2 (Dua)  
Lokasi magang : BAWASLU PROV NTB

No	Hari/Tanggal	Agenda Harian		
		Jenis kegiatan	Paraf Pembimbing Magang	Keterangan
1	Rabu, 1 Mart 2023	Mengikuti patroli kawal hak pilih yang di gelar oleh Bawaslu Prov NTB di 10 tempat ibadah yang tersebar di Kota Mataram		
2	Kamis, 2 Mart 2023	Mengikuti rapat bersama Bappenda NTB, Bawaslu NTB sampaikan Usulan Anggaran Dana Pilkada 2025		
4	Jum'at, 3 Mart 2023	Mengimput data temuan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian 10 Kabupaten/Kota		
5	Sabtu, 4 Mart 2023			Libur
6	Minggu, 5 Mart 2023			Libur
7	Senin, 6 Mart 2023	Mengikuti Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil NTB		
8	Selasa, 7 Mart 2023	Mengikuti Rapat Antara Divisi Pengawasan Bawaslu NTB dengan Bawaslu RI terkait Monitoring dan Evaluasi (Publikasi dan Pemberitaan Sosial Media)		
9	Rabu, 8 Mart 2023	Membantu membuat kwitansi terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2023 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi NTB.		
10	Kamis, 9 Mart 2023	Membuat Notulensi hasil Rapat Antara Divisi Pengawasan Bawaslu NTB dengan Bawaslu RI terkait Monitoring dan Evaluasi (Publikasi dan Pemberitaan Sosial Media)		
11	Jum'at, 10 Mart 2023	Bersama staf humas melakukan peliputan pada acara Sengketa Hukum yang diadakan oleh divisi hukum BAWASLU Prov NTB bertempat di Hotel Lombok Plaza.		
12	Sabtu, 11 Mart 2023			Libur
13	Minggu, 12 Mart 2023			Libur

14	Senin, 13 Mart 2023	Membuat pamflet terkait Kawal Hak Pilih dan membagikannya kemedi sosial agar masyarakat dapat mengecek data dirinya apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).	2	
15	Selasa, 14 Mart 2023	Melakukan pengawasan sebagai bagian dari patroli pengawasan keliling, yang bertujuan untuk memastikan warga memperoleh hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Pengawasan dilaksanakan di kawasan pemukiman kelompok rentan (Ahmadiyah) di Kecamatan Mataram di mana terdapat kerawanan adanya warga yang belum tercklit dan belum terdaftar dalam daftar pemilih	2	
16	Rabu, 15 Mart 2023	Membuat dan mengedit konten bersama anak magang lainnya di Divisi Humas dan Pengawasan untuk keperluan Medsos BAWASLU yang berisi Tugas & Fungsi BAWASLU Provinsi	2	
17	Kamis, 16 Mart 2023	Merekap data hasil pleno verifikasi faktual kesatu tingkat Provinsi NTB.	2	
18	Jum'at, 17 Mart 2023	Bersama Staf humas melakukan peliputan pada acara sengketa hukum yang diadakan oleh divisi hukum Bawaslu NTB	2	
19	Sabtu, 18 Mart 2023			
20	Minggu, 19 Mart 2023			
21	Senin, 20 Mart 2023	Mengikuti Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Kabupaten Lombok Tengah	2	
22	Selasa, 21 Mart 2023	Dinas dalam rangka intruksi pengawasan rekapitulasi hasil coklit ke loteng	2	
23	Rabu, 22 Mart 2023	Dinas dalam rangka intruksi pengawasan rekapitulasi hasil coklit ke lotim	2	
24	Kamis, 23 Mart 2023	Mengikuti Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di Kabupaten Lombok Utara	2	
25	Jum'at, 24 Mart 2023	Membantu dan mengikuti peliputan dalam rapat penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi NTB	2	
26	Sabtu, 25 Mart 2023			
27	Minggu, 26 Mart 2023			
28	Senin, 27 Mart 2023	Membantu meliput pada rapat sosialisasi tentang pemilu dan pilkada serentak 2024 yang di gelar oleh bapenda	2	
29	Selasa, 28 Mart 2023	Mebuat rekapitulasi membantu pak arya dari divisi pengawasan	2	

30	Rabu, 29 Mart 2023	Membantu melipit pada rapat Bawaslu NTB Gandeng BPKP NTB dalam Pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2024		
31	Kamis, 30 Mart 2023	Penarikan Magang di Bawaslu Provinsi NTB		

Mataram, 30 Januari 2023

Dosen Pembimbing Magang



Hidayatullah, S.IP., M.IP

NIDN .0509035902

### 3. Lampiran Dokumentasi Peserta Magang

1. Dokumentasi kegiatan membuat notulensi dalam Rapat Koodinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi NTB dalam pengawasan Tahanan Pemilu 2024



2. Dokumentasi hasil liputan di hotel Prime Park dengan judul Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 181/PMK.05/2022 Tentang Cara Pelaksanaan Penganggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum.



3. Dokumentasi hasil mengikuti kegiatan Launching Komuditas Digital Pengawasan Partisipatif Jarimu Awasi Pemilu dan Deklarasi Pelimu dan Berintegritas



4. Dokumentasi kegiatan menjadi Audiensi dengan Lembaga Pemantau Pemilu Labaki



5. Dokumentasi kegiatan kunjungan Panti Sosial Karya Wanita Mirah Adi, Kota Mataram  
Dalam rangka Mensosialisasikan Hak Pilih Kelompok Rentan (Kelayakan Panti Social)



6. Dokumentasi kegiatan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih



7. Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Paramita" Mataram. Dalam rangka mensosialisasikan hak pilih kelompok rentan

